



**PERUBAHAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2018**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019**

**Jalan Antara Nomor 445 Bengkalis
Website : www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id
Email : kesbangpolbks@yahoo.com**



DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
A. Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	9
B. Analisis Kinerja.....	10
C. Realisasi Anggaran.....	14
D. Analisis Efisiensi.....	15
BAB IV PENUTUP	20



Kata Pengantar


Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018. Setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Lakip Kabupaten Bengkalis, maka masih terdapat beberapa kondisi yang harus dilakukan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) agar tercapainya kinerja maksimal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis kedepan.

Diharapkan dengan dilakukan perubahan Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Pasal 14 Bab IX Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perda Nomor 2 Tahun 2012 diantaranya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 4 (Empat) sasaran dan terdapat 5 (Lima) indikator kinerja sasaran untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2018.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai, yaitu dari 5 (Lima) indikator kinerja sasaran sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Namun masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum terpenuhi, hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran tahun 2018 terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2018. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pasal 14 Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2018;

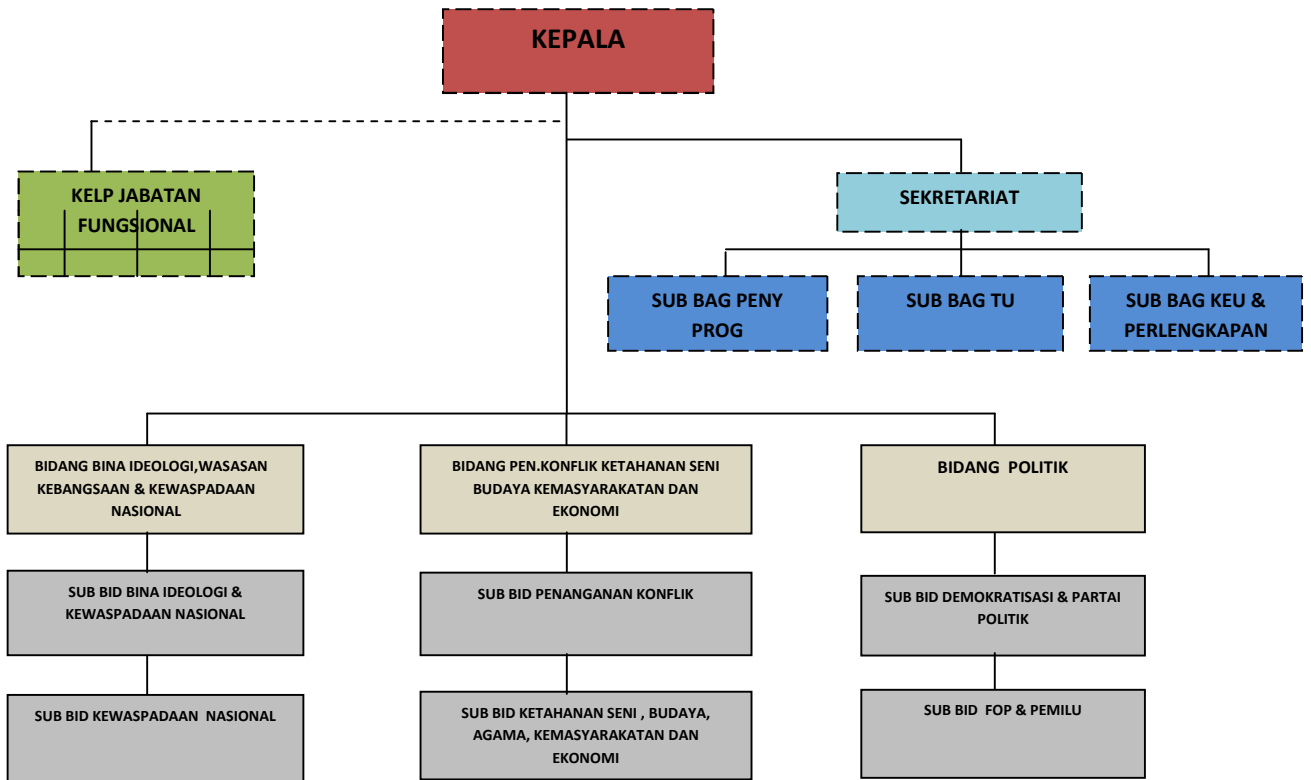
D. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

4. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Bidang Politik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi, Partai Politik dan Pemilu

Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu dapat digambarkan sebagai berikut :



1.1 Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Menguraikan secara ringkas tentang dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.

Menguraikan analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Kinerja, Realisasi Anggaran serta Analisis Efisiensi

Bab IV Penutup

Menguraikan tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan Ideologi Pancasila	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	0,60%	0,70%
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	0,60%	0,70%
	Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar nasional	40%	50%	60%	70%	80%	80%
	Persentase peran aktif masyarakat dalam peringatan hari besar keagamaan	40%	40%	50%	60%	70%	80%
Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,8%	2,8%	2,8%
	Persentase peran aktif masyarakat menjaga KAMTIBMAS	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	3,0%	3,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	50%	50%	50%	50%	50%	55%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	C	CC	B	BB	BB	BB
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	0,50%
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,50%
Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,6%
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	4,0%
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	50%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	0,50%	0,30%	60,00%
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,50%	0,30%	60,00%
Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,6%	0,40%	15,38%
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	4,0%	8,0%	200%
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	50%	54,41%	108,8%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	0,50%	0,50%	0.30%	60,00%	60,00%
Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0,50%	0,50%	0.30%	60,00%	60,00%
Rata-rata Capaian				96,00%	96,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran 1 yaitu **Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dengan indikator ***Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila*** sesuai capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 0,50%. Sedangkan realisasi 0,30% dari target yang ditentukan pada tahun 2018 sebesar 0,50% atau capaian pada tahun 2018 terhadap 2021 menunjukkan capaian (60,00%), dengan artian bahwa indikator tersebut diatas mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal sesuai target penetapan kinerja.

Sementara untuk indikator **Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**, target yang ditentukan pada tahun 2018 sebesar 0,50% dengan realisasi 0,30% atau capaian pada tahun 2018 terhadap 2021 menunjukkan capaian (60,00%), dengan artian bahwa indikator tersebut diatas mencapai realisasi capaian kinerja yang maksimal sesuai target penetapan kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada sasaran **Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** dengan indikator *Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila* dan *Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan*, tercapai sesuai target yang ditentukan karena Kegiatan yang dikemas berupa penyuluhan dan sosialisasi menjadikan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat tinggi. Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2018 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran 1.

Disamping itu juga dukungan semua pihak terutama stakeholders terkait termasuk anggaran pelaksanaan kegiatan juga tersedia sesuai jadwal kegiatan.

Sasaran 2

Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	2,6%	2,6%	0,40%	15,38%	15,38%
Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	4,0%	4,0%	8,0%	200%	200%
Rata-rata Capaian				46,14%	46,14%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS** dengan indikator *Persentase penurunan gangguan*

KAMTIBMAS sesuai capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 2,6%. Sementara target indikator pada tahun 2018 adalah 2,6% , dengan realisasi 0,40%, sehingga capaian pada tahun 2018 sebesar 15,38%.

Sedangkan untuk indikator *Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan* terdapat realisasi 8,0% dari target 4,0% dengan capaian sebesar 200%. Hal ini disebabkan Kegiatan pembinaan Ormas secara maksimal belum sepenuhnya terlaksana terkait rasionalisasi anggaran pada tahun 2018.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada indikator *Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS* sesuai target yang ditentukan karena dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis melalui pelaksanaan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat seperti dilakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya peredaran miras, narkoba dan terorisme, sehingga masyarakat mendapatkan pembinaan secara langsung terhadap bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat mendapatkan kondisi yang aman dan tertib melalui pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat sendiri dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kembali pada Fokus prioritas program dan kegiatan ini pada tahun 2018 menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran 2.

Sasaran 3

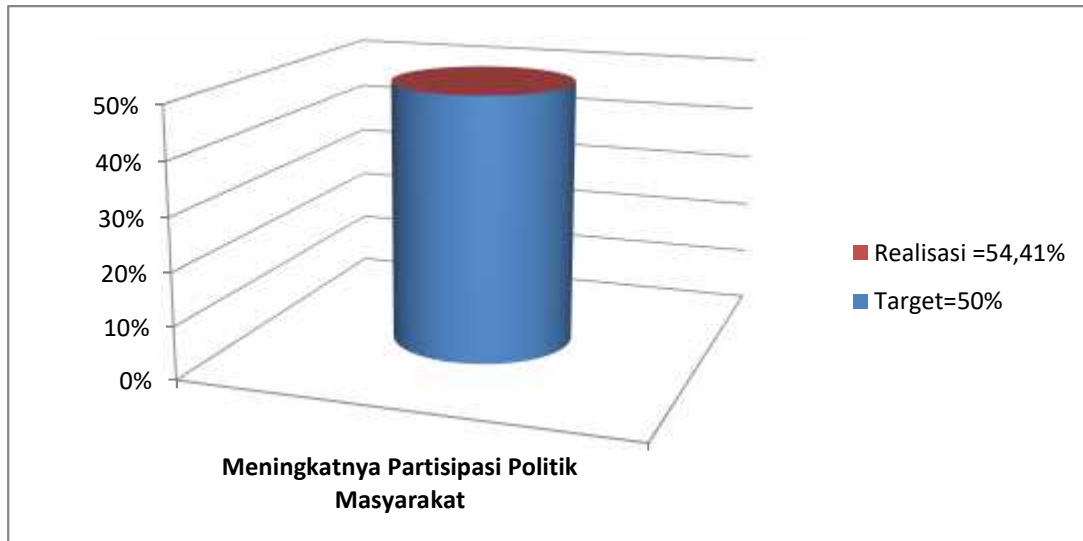
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	40%	50%	54,41%	108,8%	108,8%
Rata-rata Capaian				108,8%	108,8%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat** dengan indikator *Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu*, capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 40% dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada pelaksanaan Pemilu. Sementara target indikator pada tahun 2018 adalah 50%, realisasi indikator *Persentase peran aktif masyarakat dalam*

proses pemilu yaitu 54,41% sehingga capaian nya pada 2018 adalah 108,8%. Khusus untuk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 telah dilakukan pesta demokrasi yaitu Pemilu Serentak Pemilihan Gubernur Riau, dengan hasil 54,41 %, besaran partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dimaksud.

Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat** dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Untuk indikator *Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu* dengan dilakukannya berbagai upaya agar pendidikan politik masyarakat dapat tercapai seperti melalui penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat serta melalui media, baik media elektronik dan publikasi (baliho, spanduk, banner) dalam Pemilu Gubernur Riau pada tahun 2018 yang telah lalu dan Pemilu Pilpres dan Legislatif tahun 2019 yang akan datang. Dari capaian indikator ini dapat disimpulkan bahwa indikator ini berhasil dengan baik dilihat dari peningkatan peran aktif dan partisipasi politik masyarakat terhadap Pemilu.

Sasaran 4**Meningkatnya akuntabilitas kinerja**

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat akuntabilitas kinerja	C	CC	B	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa terhadap capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja** pada tahun 2017 adalah C. Sementara target indikator pada tahun 2018 adalah CC. Untuk indikator *Predikat akuntabilitas kinerja* berdasarkan realisasi capaian tahun 2018 adalah B. Dari capaian indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut diatas telah berhasil dari target awal CC.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pada indikator *Predikat akuntabilitas kinerja* realisasi dari target penetapan kinerja pada tahun 2018 dengan predikat B. Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta dirubah lagi dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan pelaksanaan APBD berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2018.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.621.311.902,- atau 89,79 % dari pagu sebesar Rp. 7.374.090.866,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat** yaitu sebesar 88,84%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran **Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan** yaitu 75,32%.

Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2018 sebagai berikut:

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100%	Rp. 331.237.350,-	Rp. 249.480.700,-	75,32
Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	100%	Rp. 557.865.500,-	Rp. 462.390.500,-	82,80
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	100%	Rp. 420.920.300,-	Rp. 373.938.900,-	88,84
Total		Rp. 1.310.023.150,-	Rp. 1.085.810.100,-	246,9

D. Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100%	75,32	24,68
2.	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	100%	82,80	17,20
3.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	100%	88,84	11,16

1.1. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 7.374.090.866,-** dengan **realisasi keuangan sebesar Rp. 6.621.311.902,-** atau **setara 89,79%**, sedangkan realisasi fisik **mencapai 100%**, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. *Anggaran Belanja Tidak Langsung* sebesar **Rp. 4.223.816.416,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.804.797.124,-**, atau sebesar 90,08%.
- b. *Anggaran Belanja Langsung* sebesar **Rp. 3.150.274.450,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.816.514.778,-**, atau sebesar 89,41%.

Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			<i>Keuangan</i>	%	<i>Fisik</i> %
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.223.816.416,00	3.804.797.124,00	90,08	100
II.	BELANJA LANGSUNG	3.150.274.450,00	2.816.514.778,00	89,41	100
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.440.306.100,00	1.373.038.914,00	95,33	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.150.000	36.150.000	100,00	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.920.000	64.527.113	83,31	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	12.000.000	5.940.000	49,51	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	145.504.000	137.504.000	94,50	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.921.700	43.917.700	99,99	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.431.400	35.553.400	97,59	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.919.000	15.919.000	100,00	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000	7.320.000	76,25	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	78.475.000	67.200.000	85,63	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	750.000.000	748.621.861	99,82	100
11	Penyediaan jasa keamanan	115.200.000	115.200.000	100,00	100
12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	19.200.000	19.200.000	100,00	100
13	Publikasi informasi pembangunan	75.985.000	75.985.000	100,00	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	284.875.000,00	965.780.565,00	96,01	100
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34.375.000	19.500.000	56,73	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	190.000.000	107.735.799	56,70	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.500.000	23.905.300	93,75	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.000.000	34.628.000	98,94	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	62.000.000,00	58.250.115,00	93,95	100
1	Kursus, workshop dan seminar	62.000.000	58.250.115	93,95	100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.766.900,00	35.183.300,00	88,47	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	15.286.800	13.455.900	88,02	100
2	Penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan pemeliharaan barang unit	24.480.100	21.727.400	88,78	100
V	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	421.007.400,00	386.096.700,00	91,71	100

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			Keuangan	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
1	Pembekalan bagi Forum Komunikasi Umat Beragama	125.772.200	125.682,200	99,93	100
2	Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006	50.885.600	50.535.900	99,35	100
3	Penyuluhan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	77.475.600	73.262.600	94,56	100
4	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	166.894.000	73.262.600	94,56	100
VI	Program Kermitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	481.398.750,00	404.237.750,00	83,97	100
1	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme	102.513.600	99.413.600	96,98	100
2	Pembekalan bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	19.720.000	18.990.000	96,30	100
3	Penyuluhan peningkatan kesadaran bela Negara bagi aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan	90.427.250	77.463.250	85,66	100
4	Pembekalan bagi Kominda 'Dinas Instansi dan Aparat	178.850.700	126.753.700	70,87	100
5	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	89.887.200	81.617.200	90,80	100
VII	Program Pendidikan Politik Masyarakat	420.920.300,00	373.938.900,00	88,84	100
1	Rapat dan Koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	58.751.600	58.401.600	99,40	100
2	Monitoring Pemliu Gubernur Riau	111.131.300	66.766.300	60,08	100
3	Sosialisasi kepada masyarakat pada Pemilu Gubernur Riau	251.037.400	248.771.000	99,10	100
	JUMLAH (BTL + BL)	7.374.090.866,00	6.621.311.902,00	89,79	100

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu tahun anggaran 2018 sudah mencapai kinerja maksimal, namun penyerapan anggaran belum terealisasi terkait adanya rasionalisasi anggaran sebagai akibat dari kekosongan KAS Daerah Kabupaten Bengkulu.

BAB IV

P E N U T U P

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2018 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Yaitu dari 6 (enam) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sebelumnya telah ditentukan. Namun demikian untuk tahun 2019, Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis perlu dukungan dan komitmen secara aktif semua pihak sehingga benar-benar dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai bukti nyata komitmen penerima amanah bukan hanya menjadi wacana dan polemik pemikiran semata-mata
2. Optimalisasi mekanisme internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun mendatang harus lebih memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan permasalahan yang ada dapat diminimalisir agar tidak mempengaruhi terhadap nilai capaian indikator kinerja
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas khususnya dengan Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis, dengan LSM, Ormas serta pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
4. Dilakukan upaya-upaya guna mengantisipasi hambatan/masalah yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

- a). Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
- b). Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
- c). Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efisiensi, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
- d). Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.